

# RENJA 2025



## RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

Jl. Mayjen Sutoyo No 59 Purworejo 54113  
Telp (0275) 321603, Faks (0275) 321603  
Laman [inspektorat.purworejokab.go.id](http://inspektorat.purworejokab.go.id)  
Pos-el [inspektorat@purworejokab.go.id](mailto:inspektorat@purworejokab.go.id)





**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tahunan daerah, Perangkat Daerah tiap tahun wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu pengaturan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 9)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2025 dan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

**Pasal 2**

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

**Pasal 3**

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu;
- c. bab III : tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
- e. bab V : penutup.

(2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
- b. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;
- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo;
- h. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
- k. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo;



- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- o. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo;
- q. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
- r. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
- s. Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
- t. Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo;
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo;
- x. Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo;
- z. Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;
- aa. Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
- bb. Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
- cc. Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo;
- dd. Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo;
- ee. Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- ff. Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
- gg. Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
- hh. Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- ii. Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
- jj. Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
- kk. Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;
- ll. Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
- mm. Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
- nn. Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo; dan
- oo. Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI PURWOREJO,



YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2024 NOMOR 55 SERI E NOMOR 50

LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.1.1. Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Keberhasilan pembangunan diawali dari penyusunan dokumen perencanaan yang baik tujuan, sasaran maupun target yang jelas sesuai yang diharapkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 diatas terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perencanaan daerah yang telah disusun tersebut perlu dijabarkan lagi oleh setiap perangkat daerah selaku pelaksana pembangunan di daerah kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah sebagai pedoman operasional penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau yang biasa disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah disiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja perangkat daerah yang disusun memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

#### **1.1.2. Proses Penyusunan**

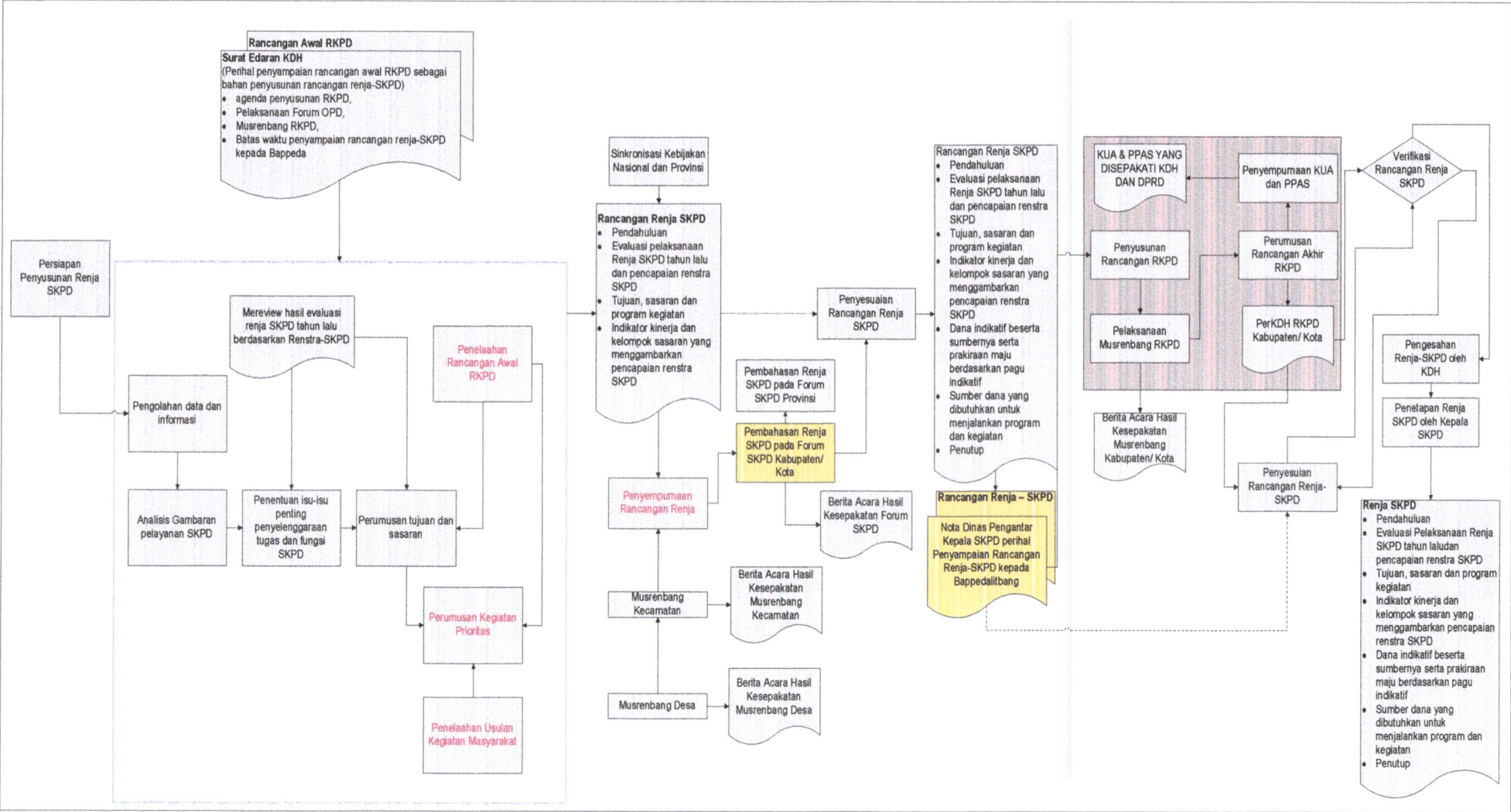
Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah. Tahapan-tahapan penyusunan tersebut meliputi :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Pelaksanaan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1  
Tahapan Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah



### **1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional memiliki saling keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lain. Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya serta melihat dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Penetapan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program kegiatan dilakukan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra PD dan RPJMD tahun perencanaan.

Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan Perangkat Daerah secara lebih kongkrit dan terukur. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 144 Seri E Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 80 Seri E Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 82 Seri D Nomor 29)
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 9)



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dilaksanakan dengan maksud :

- a. Menjabarkan rencana strategis perangkat daerah dalam rencana kerja tahunan perangkat daerah jangka pendek (1 tahun).
- b. Menyelaraskan rencana strategis dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah :

- a. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun untuk mencapai tujuan, sasaran dan target capaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Inspektorat Kabupaten Purworejo mengalami perubahan menjadi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo mulai 1 Januari 2025. Untuk itu, nomenklatur Inspektorat dalam Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 disesuaikan, sembari menunggu penetapan masing-masing peraturan bupati yang mengaturnya.

Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat penjelasan umum mengenai Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Reviu

Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, dan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pagu Indikatif dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan Renja dan Rencana Tindak Lanjut secara garis besar.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo selama tahun 2023. Hasil evaluasi ini akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025 dan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu bertujuan untuk mengidentifikasi pencapaian perangkat daerah dalam memenuhi target sasaran program kegiatan yang ditetapkan dan hambatan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, perangkat daerah dapat merumuskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dan permasalahan dalam merealisasikan fisik kegiatan dan penggunaan anggaran program/kegiatan. Kebijakan-kebijakan yang diambil dapat berupa efisiensi alokasi belanja sesuai kebutuhan pencapaian target, penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target, penyesuaian indikator dan target kinerja keluaran/hasil kegiatan; dan perumuskan kembali kegiatan prioritas dan lanjutan untuk percepatan pencapaian target.

Capaian kinerja anggaran, output dan outcome pada program/kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo selama tahun 2023 dapat dilihat pada pada tabel TC-29 pada halaman berikut ini:



Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Kabupaten Purworejo

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06					Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.									
06	01				Bidang Urusan Inspektorat Daerah									
06	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
06	01	01	201		<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>23 Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>17 Dokumen</b>	<b>73,910%</b>
06	01	01	201	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100,00%	19 Dokumen	49 Dokumen	55,05%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0 Dokumen	2 Dokumen	100%
06	01	01	201	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0 Dokumen	2 Dokumen	100%
06	01	01	201	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0 Dokumen	2 DOKumen	100%
06	01	01	201	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0 Dokumen	2 Dokumen	100%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100,00%	16 Laporan	48 Laporan	60,00%
06	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	3 Laporan	11 Laporan	47.82%
06	01	01	202		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
06	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	319 Orang	67 Orang/bulan	68 Orang/bulan	65 Orang/bulan	95,59%	64 Orang/bulan	196 Orang/Bulan	61,44%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	36 Dokumen	60,00%
06	01	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	6 Laporan	18 Laporan	60,00%
06	01	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	130 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	100,00%	26 Laporan	78 Laporan	60,00%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	203		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	100,00%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100,00%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
06	01	01	203	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	5 Dokumen	55,55%
06	01	01	203	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	5 Laporan	55,55%
06	01	01	205		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
06	01	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	1 paket	100%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Hasil Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	205	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100%
06	01	01	205	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00%
06	01	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	490 Orang	67 Orang	68 Orang	71 Orang	104,41%	120 Orang	258 Orang	52,65%
06	01	01	205	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	520 Orang	67 Orang	68 Orang	110 Orang	161,76%	130 Orang	307 Orang	59,03%
06	01	01	205	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	430 Orang	67 Orang	50 Orang	45 Orang	90,00%	100 Orang	212 Orang	49,30%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	206		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
06	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	1 Paket	4 Paket	57,14%
06	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Paket	60,00%
06	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	3 Paket	6 Paket	60,00%
06	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00%	12 Paket	36 Paket	62,06%
06	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00%	2 Paket	26 Paket	86,66%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	5 Dokumen	71,42%
06	01	01	206	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Paket	60,00%
06	01	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%
06	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%
06	01	01	206	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	12 Dokumen	60,00%
06	01	01	206	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	6 Dokumen	60,00%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	14 Jenis	5 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,00%	3 Jenis	10 Jenis	71,42%
06	01	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	100%
06	01	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	-	-	-	-	3 Unit	150%
06	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Unit	64 Unit	-	-	-	1 Unit	65 Unit	101,56%
06	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	165 Unit	65 Unit	16 Unit	16 Unit	100,00%	7 Unit	88 unit	53,33%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	207	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
06	01	01	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	3 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00%	2 Unit	13 Unit	76,47%
06	01	01	208		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>15 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>9 Laporan</b>	<b>60%</b>
06	01	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%
06	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%
06	01	01	209		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jenis Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara pada tahun tertentu</b>	<b>27 Jenis</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>16 Jenis</b>	<b>59,25%</b>
06	01	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	3 Unit	60,0%
06	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	10 Unit	11 Unit	11 Unit	100,00%	5 Unit	26 Unit	89,65%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	-	-	-	-	20 Unit	100%
06	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	395 Unit	74 Unit	83 Unit	82 Unit	98,80%	68 Unit	224 Unit	56,70%
06	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	3 Unit	60,00%
06	01	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	124 Unit	24 Unit	27 Unit	25 Unit	92,59%	26 Unit	75 Unit	60,48%
06	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
						<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	02	201		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%	7 Dokumen	21 Dokumen	60%
06	01	02	201	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	534 Laporan	111 Laporan	162 Laporan	169 Laporan	104,32%	119 Laporan	399 Laporan	74,71%
06	01	02	201	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	617 Laporan	178 Laporan	115 Laporan	132 Laporan	114,78%	137 Laporan	447 Laporan	72,44%
06	01	02	201	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	1 Laporan	4 Laporan	66,6%
06	01	02	201	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	273 Laporan	30 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	100,00%	71 Laporan	133 Laporan	48,71%
06	01	02	201	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	321 Laporan	63 Laporan	87 Laporan	125 Laporan	143,68%	83 Laporan	271 Laporan	84,42%
06	01	02	201	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	8 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	100,00%	3 Kesepakatan	7 Kesepakatan	87,50%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	02	201	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	320 Dokumen	278 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	6 Dokumen	290 Dokumen	90,62%
06	01	02	202		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>10 laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>60%</b>
06	01	02	202	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	32 Laporan	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	4 Laporan	22 Laporan	68,75%
06	01	02	202	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	385 Laporan	117 Laporan	94 Laporan	134 Laporan	142,55%	115 Laporan	366 Laporan	95,06%
06	01	03			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						<b>Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>06</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>201</b>		<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>10 dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>60%</b>
06	01	03	201	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	15 Rekomendasi	3 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	150,00%	3 Rekomendasi	9 Rekomendasi	60,00%
06	01	03	201	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	15 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	14 Rekomendasi	466,67%	3 Rekomendasi	19 Rekomendasi	126,66%
<b>06</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>202</b>		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>20 laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>60%</b>
06	01	03	202	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	100,00%	6 perangkat daerah	18 Perangkat Daerah	60,00%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	01	03	202	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	675 perangkat daerah	79 perangkat daerah	152 perangkat daerah	158 perangkat daerah	103,95%	182 perangkat daerah	419 Perangkat Daerah	62,07%
06	01	03	202	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18 Kegiatan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%	3 Kegiatan	12 Kegiatan	66,66%
06	01	03	202	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	667 perangkat daerah	54 perangkat daerah	165 perangkat daerah	165 perangkat daerah	100,00%	165 perangkat daerah	384 Perangkat Daerah	57,57%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, maka untuk mengetahui kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dapat diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2021 – 2026 adalah meliputi "Tingkat Maturitas SPIP" dan "Indek Kepuasan Masyarakat"

Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat  
Kabupaten Purworejo

No	Sasaran	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Th. 2022 (n-3)	Th. 2023 (n-2)	Th. 2024 (n-1)	Th. 2025 (n)	Th. 2026 (n+1)	Th .2022 (n-3)	Th. 2023 (n-2)	Th. 2024 (n-1)	Th. 2025 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern	-	-	3,075	3,10	3,31	3,325	3,50	3,0012	3,309	3,31	3,325	Nilai Hasil PK dari BPKP
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	-	-	81,50	82,70	83,50	84,00	84,50	82,90	84,33	84,40	84,50	Hasil SKM atas layanan OPD

Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator Tingkat maturitas SPIP adalah 3,309 dengan Status Capaian "Tercapai". Jika dilihat dari capaian nilai penjaminan kualitas dari BPKP menunjukkan bahwa realisasi capaian tersebut melampaui target yang direncanakan yaitu 3,10. Capaian ini didapat dengan dukungan semua perangkat daerah dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

Terhadap Hasil Survei Kepuasan Mitra Kerja (SKM), Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo telah melaksanakan Survei Kepuasan Mitra Kerja (SKM) berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Realisasi hasil survei



yang dilakukan menunjukkan bahwa indeks kualitas pelayanan publik pada Inspektorat Daerah telah tercapai melebihi target di tahun 2023.

Pelaksanaan pelayanan publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 84,33. Dengan demikian, nilai SKM Inspektorat Daerah menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2023.

Program-program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2023 telah terlaksana sesuai rencana kerja dan telah terealisasi 100% sebagaimana dilihat pada tabel T berikut

Tabel TC-30a.Pencapaian Kinerja Program Tahun 2023  
Inspektorat Kabupaten Purworejo

No	Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	100%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Daerah	100%	100%
		Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%	100%

**2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Daerah. Isu strategis yang muncul adalah "Belum optimalnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Implementasi program Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi seluruh OPD, Peningkatan kapasitas kelembagaan Internal Audit Capability Model (IACM) dan Implementasi

*Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM)* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo”.

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat selama Tahun 2023, menjadikan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat baik yang berasal dari kondisi internal maupun kondisi eksternal antara lain :

Isu Internal yang mempengaruhi pencapaian sasaran Inspektorat Daerah tersebut antara lain :

1. Masih lemahnya penerapan pengawasan secara berkala pada Perangkat Daerah, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
2. Jumlah dan substansi pengaduan masyarakat kurang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang tersedia.
3. Kerjasama bidang pengawasan dengan aparat pengawasan internal dan eksternal sudah berjalan dengan didukung sumber daya yang memadai.
4. Pendampingan dalam rangka penilaian mandiri SPIP Terintegrasi masih memerlukan SDM yang kompeten.
5. Monitoring penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal sudah dilakukan secara rutin, namun hasilnya kurang maksimal.
6. Masih lemahnya implementasi Pengawasan berbasis IT dari perencanaan sampai dengan penyusunan laporan.
7. Pemberian layanan konsultasi bidang pengawasan kurang mendapatkan respon dari mitra inspektorat.
8. Tersedianya anggaran dan prasarana pendukung lainnya yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan khususnya pendampingan PMPRB, pencegahan tindak pidana korupsi dan penyelenggaraan layanan internal inspektorat yang prima.
9. Masih lemahnya penerapan kendali mutu pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
10. Perencanaan pengawasan berbasis risiko belum dapat dilakukan secara maksimal.

Adapun isu eksternal yang ada dalam internal Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo antara lain :



1. Adanya support dari Pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan maupun fasilitas untuk menunjang peran dan kedudukan Inspektorat Daerah.
2. Piloting dan Implementasi *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM) untuk mendukung tugas pokok Pemda dan APIP.
3. Masih lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
4. Semakin tingginya tuntutan dan peran Inspektorat Daerah dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat antara lain KPK, BPK, LKPP maupun kementerian dan lembaga teknis lainnya.
5. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi isu yang tidak dapat lepas dari peran Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan.
6. Beberapa tugas mandatory lainnya yang mengharuskan Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pemenuhan elemen MCP oleh KPK RI.

#### **2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk mengetahui keselarasan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan perangkat daerah setelah dilakukan pembahasan dalam forum perangkat daerah, dan kajian program dan kegiatan.

Sesuai rancangan awal RKPD pada tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo mengusulkan tiga program terdiri dari :

- 1 (satu) program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, yang didukung dengan adanya 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.
- 2 (dua) buah program pada fungsi Pendukung Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan yang didukung 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi yang didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan.

Berdasar Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dengan hasil analisa kebutuhan perangkat daerah tahun 2025 terdapat beberapa sub kegiatan yang pagu indikatifnya berkurang dan bertambah. Bertambah dan

berkurangnya pagu indikatif sub kegiatan hasil analisa kebutuhan dari pagu indikatif Rancangan awal RKPD tahun 2025 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan yang didasarkan pada ketercukupan anggaran pada tahun tahun sebelumnya, perubahan target indikator/output sub kegiatan, penyesuaian standar harga satuan dan perubahan rencana desain kegiatan.

Hasil analisa kebutuhan Inspektorat Daerah Tahun 2025 sudah mengakomodir *mandatory spending* anggaran dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 juga sudah memasukkan program/kegiatan yang didalamnya terdapat *mandatory* penugasan pembinaan dan pengawasan dari Pusat maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31.



Tabel T-C.31  
 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
 Kabupaten Purworejo

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupten Purworejo											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
	Bidang Urusan Inspektorat Daerah				15.528.446.738	Bidang Urusan Inspektorat Daerah				15.001.051.401	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Purworejo	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten	100%	12.268.981.838	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Purworejo	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	12.134.231.001	
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3 Dokumen	36.599.900	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	29.106.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	26.763.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	23.378.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	1.783.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	855.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.052.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.872.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	9.889.566.488	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9.831.785.739	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Purworejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	9.877.788.388	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Purworejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	9.826.667.739	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.426.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.366.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	4.027.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.227.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 Laporan	2.324.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 Laporan	524.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100%	4.693.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100 %	3.493.600	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.027.400	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.427.400	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.666.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.066.200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.377.659.350	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.381.701.300	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	79.661.500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	82.962.200	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Purworejo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	1.272.916.600	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Purworejo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	1.273.658.300	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	9.696.750	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	9.696.600	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	15.384.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	15.384.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	327.912.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	289.635.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.906.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.903.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.178.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.138.800	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.218.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.204.900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.635.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.633.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.834.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26.782.800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.796.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.332.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	19.540.000	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	19.540.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.865.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.865.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	129.491.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	108.291.500	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	17.303.600	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	10.800.600	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	29.143.800	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	29.143.800	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Jenis	170.855.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	3 Jenis	180.835.900	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kabupaten Purworejo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	4.638.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	159.642.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	159.642.900	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit	11.212.300	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	16.555.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	159.668.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purworejo	Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	3 Laporan	159.667.362	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	650.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	650.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111.005.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111.005.362	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	48.012.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	48.012.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purworejo	Jenis Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara pada tahun tertentu	5 Jenis	302.026.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purworejo	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	5 Jenis	258.005.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.960.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	85.560.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	97.520.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	48.402.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68 Unit	48.400.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	106.894.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.955.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	21.220.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purworejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	18.170.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Purworejo	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	1.719.140.600	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Purworejo	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	1.524.506.900	
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%			Kabupaten Purworejo	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7 Dokumen	1.397.046.400	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan pengawasan internal	7 Dokumen	1.214.092.500	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	~Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	72 Laporan	146.334.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	74 Laporan	146.334.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	~Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	96 Laporan	135.929.300	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	96 Laporan	109.746.700	
	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Purworejo	~Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	17.711.400	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	17.711.400	
	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Purworejo	~Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	109.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	100.300.400	
	Pengawasan Desa	Kabupaten Purworejo	~Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	98 Laporan	252.023.100	Pengawasan Desa	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	98 Laporan	250.000.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Purworejo	~Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	41.048.600	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Purworejo	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	30.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Purworejo	~Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	695.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	560.000.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 laporan	322.094.200	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Purworejo	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	2 Laporan	310.414.400	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Purworejo	~Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	77.982.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	70.000.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Purworejo	~Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	121 Laporan	244.112.200	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	121 Laporan	240.414.400	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Purworejo	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	100%	1.540.324.300	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Purworejo	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Daerah	100 %	1.342.313.500	
			Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%				Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 dokumen	76.236.800	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 Dokumen	63.460.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	64.940.200	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	56.436.400	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	11.296.600	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Purworejo	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	7.023.600	
	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	4 laporan	1.464.087.500	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Purworejo	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	4 Laporan	1.278.853.500	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 perangkat daerah	16.941.500	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purworejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 perangkat daerah	15.302.100	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Purworejo	-Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	231 perangkat daerah	450.267.800	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Purworejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	190 perangkat daerah	292.500.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Purworejo	-Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	821.051.400	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Purworejo	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	821.051.400	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Purworejo	-Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	156 perangkat daerah	175.826.800	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Purworejo	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	165 perangkat daerah	150.000.000	

**2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 disusun berdasarkan hasil pencermatan usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh Sekretariat dan Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan hasil penelaahan kondisi lapangan pada tahun sebelumnya yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain dari internal Inspektorat Daerah juga ditampung usulan dari masyarakat secara langsung apabila ada yang disampaikan pada saat penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dengan dihadiri unsur DPRD Kabupaten Purworejo sebagai Narasumber, unsur Perangkat Daerah, dan unsur Perangkat Daerah Pemangku Wilayah Kecamatan. Kesepakatan dalam Forum Perangkat Daerah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Purworejo dengan nomor 000.7.2.6/363/2024.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel T-C.32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Purworejo

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

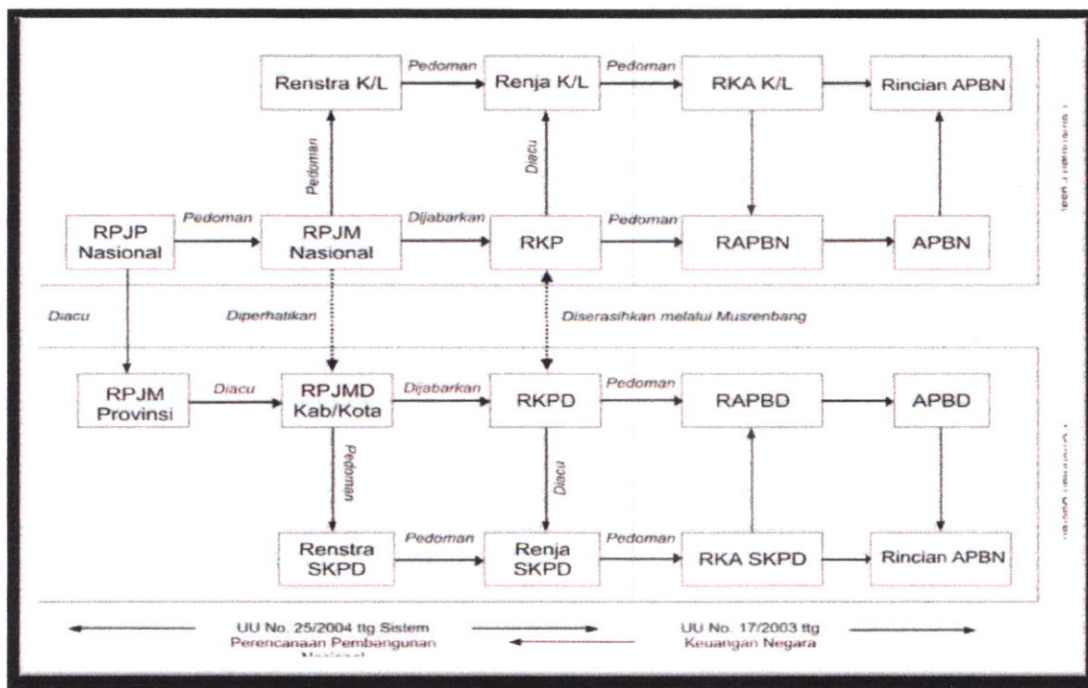


### BAB. III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan pemerintah daerah harus mempedomani dan selaras dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional dan perencanaan pembangunan di atasnya. Sistematis hubungan perencanaan pembangunan pusat dan daerah dapat dinarasikan seperti dalam gambar berikut :



\*Sumber Data : Permendagri 86/2017, Permendagri 22/2018

Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan Renja PD dalam penyusunannya harus telah mempedomani, mengacu, memperhatikan RPJMD, RPJM Provinsi, RPJM Nasional dan RPJP Nasional secara berjenjang. Adapun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten yang telah diserasikan dengan Renja Pemerintah di atasnya melalui Musrenbang.

Mengikuti alur hubungan perencanaan diatas maka Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-

2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 yang telah mempedomani, mengacu, memperhatikan dan diserasikan dengan perencanaan di atasnya seperti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025, Tema Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah “Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing melalui Penguatan Sektor Ekonomi yang Unggul dan Berwawasan Lingkungan Global” dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tahun 2025 diarahkan kepada:

1. Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan.
2. Perwujudan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana.
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas Kapasitas Sumber Daya Manusia.
4. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan.

Berdasarkan telaah kebijakan tersebut di atas dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah diamanatkan untuk melaksanakan misi ke-4 yaitu Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 diarahkan kepada upaya mendukung Pewujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.**

Tujuan dan sasaran renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai perangkat daerah yang mendukung pencapaian misi ke-4, mengacu pada dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023 tentang Perubahan



Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo adalah :

- 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas.
- 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo adalah :

- 1. Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern.
- 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.32a  
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas		Nilai Area Penguatan Pengawasan	2,87	2,90	3,10	3,12	3,19
		Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern	Tingkat Maturitas SPIP	3,075	3,10	3,31	3,325	3,50
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,50	82,70	83,50	84,00	84,50
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,50	82,70	83,50	84,00	84,50

Sumber : Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026

3.3.Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan maka diperlukan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang aktivitas didalamnya menghasilkan output dan keluaran sesuai indikator pencapaian target visi misi Kabupaten Purworejo pada tahun 2025. Penyusunan program, dan kegiatan pada rencana kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2026 dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Penyesuaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan terhadap Pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel TC-32b.



Tabel T-C.32b  
Penyesuaian Subkegiatan terhadap Pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Renstra PD Perbup No 48 Tahun 2022				Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Pemutakhiran)			
Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
06.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten</b>	%	06.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten</b>	%
06.01.01.2.01	<b>Perencanaan Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	Dokumen	06.01.01.2.01	<b>Perencanaan Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	Dokumen
06.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	06.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
06.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	06.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen
06.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	06.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	-Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
06.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	06.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen
06.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	06.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
06.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	06.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
06.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	06.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan



Renstra PD Perbup No 48 Tahun 2022				Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Pemutakhiran)			
Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
06.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	%	06.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	%
06.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	06.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang
06.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	06.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
06.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	06.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
06.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	06.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
06.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>	%	06.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>	%
06.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	06.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
06.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	06.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
06.01.01.2.04	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	%	06.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	%
06.01.01.2.04.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	06.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen



Renstra PD Perbup No 48 Tahun 2022				Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Pemutakhiran)			
Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
06.01.01.2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	06.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
06.01.01.2.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	06.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
06.01.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	06.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
06.01.01.2.05	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	%	06.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	%
06.01.01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	06.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
06.01.01.2.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	06.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
06.01.01.2.05.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	06.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
06.01.01.2.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	06.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
06.01.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	06.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
06.01.01.2.05.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	06.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
06.01.01.2.05.07	Penyediaan Bahan/Material	-Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	06.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	-Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket
06.01.01.2.05.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	06.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan



Renstra PD Perbup No 48 Tahun 2022				Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Pemutakhiran)			
Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
06.01.01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	06.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
06.01.01.2.05.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	06.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
06.01.01.2.05.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	06.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
06.01.01.2.06	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	Jenis	06.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	Jenis
06.01.01.2.06.05	Pengadaan Mebel	-Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	06.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
06.01.01.2.06.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	06.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
06.01.01.2.06.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	06.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
06.01.01.2.07	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Laporan	06.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Laporan
06.01.01.2.07.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	06.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
06.01.01.2.07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	06.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
06.01.01.2.07.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	06.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
06.01.01.2.08	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jenis Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara pada tahun tertentu</b>	Jenis	06.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jenis Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara pada tahun tertentu</b>	Jenis



Renstra PD Perbup No 48 Tahun 2022				Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Pemutakhiran)			
Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
06.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	06.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
06.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	06.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
06.01.01.2.08.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	06.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
06.01.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	06.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit
06.01.01.2.08.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	06.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit
06.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	%	06.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	%
		<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	%			<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	%
06.01.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Dokumen	06.01.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Laporan
06.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	06.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan
06.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	06.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan
06.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	-Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	06.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	-Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan
06.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	-Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	06.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	-Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan



Renstra PD Perbup No 48 Tahun 2022				Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Pemutakhiran)			
Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
06.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	-Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	06.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	-Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan
06.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	-Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	06.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	-Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan
06.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	06.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen
06.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Laporan	06.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Laporan
06.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	06.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan
06.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	06.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan
06.01.03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan</b>	%	06.01.03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan</b>	%
		<b>Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi</b>	%			<b>Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi</b>	%
06.01.03.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	Dokumen	06.01.03.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	Dokumen
06.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomen dasi	06.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomen dasi
06.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomen dasi	06.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomen dasi



Renstra PD Perbup No 48 Tahun 2022				Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Pemutakhiran)			
Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan
06.01.03.2.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi</b>	Laporan	06.01.03.2.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi</b>	Laporan
06.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	06.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah
06.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	06.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah
06.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	06.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan
06.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	06.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah

Program dan kegiatan beserta sub kegiatan dalam rencana kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 meliputi :

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

B. Kegiatan/Sub Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
  - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
  - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - c. Reviu Laporan Kinerja;
  - d. Reviu Laporan Keuangan;
  - e. Pengawasan Desa;
  - f. Kerjasama Pengawasan Internal;
  - g. Monitoring dan Eavaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
  - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
  - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
3. Perumusan Kebijakan Tehnis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
  - a. Perumusan Kabijakan Tehnis di Bidang Pengawasan;
  - b. Perumusan Kebijakan Tehnis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
4. Pendampingan dan Asistensi;
  - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
  - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - d. Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;



6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
  - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. Penyediaan Bahan/Material;
  - h. Fasilitas Kunjungan Tamu;
  - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
  - k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

Penyusunan program/kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan kaidah dan aturan-aturan yang berlaku, diantaranya penyusunan program/kegiatan Tahun 2025 memperhatikan *mandatory spending* pengawasan guna meningkatkan dan mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Rumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo disajikan dalam tabel TC-33.



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURWOREJO  
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasiona l	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						INSPEKTORAT DAERAH						15.001.051.401,0 0						16.014.818.923,0 0		
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						15.001.051.401,0 0							16.014.818.923,0 0	
	6	0 1				INSPEKTORAT DAERAH						15.001.051.401,0 0							16.014.818.923,0 0	
1	6	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-			100 %	12.134.231.001,0 0						-	12.848.101.893,0 0	
	6	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	29.106.200,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo	-	38.678.200,00	
	6	0 1	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					19 Dokumen	23.378.100,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel,	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		27.858.490,00	INSPEKTORA T DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasiona l	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														kapabel, prima, dan transparan						
	6	0 1	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					16 Laporan	855.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		1.961.960,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	4.872.500,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		8.857.750,00	INSPEKTORA T DAERAH



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasiona l	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	9.831.785.739,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo	-	10.310.083.663,0 0	
	6	0 1	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	9.826.667.739,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		10.297.127.808,0 0	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2.366.100,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		5.968.765,00	INSPEKTORA T DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasiona l	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	0 1	0 1	2.0 2	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	2.227.900,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		4.430.690,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD				26 Laporan	524.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		2.556.400,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	-			100 %	3.493.600,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo	-	5.162.960,00	
	6	0 1	0 1	2.0 3	000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.427.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		2.230.140,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2.066.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		2.932.820,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	1.381.701.300,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	-	1.515.425.285,00	
	6	0	0	2.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
		1	1	5	5															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasiona l	Dacrah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	82.962.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		87.627.650,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				65 Orang	1.273.658.300,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		1.400.208.260,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 5	001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	9.696.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		10.666.425,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 5	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasiona l	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	15.384.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		16.922.950,00	INSPEKTORAT DAERAH			
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	289.635.900,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo	-	355.442.285,00				
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.903.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		9.797.590,00	INSPEKTORAT DAERAH			
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasiona l	Dacrah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.138.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		15.564.120,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.204.900,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		11.510.015,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	49.633.500,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		54.599.160,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasiona l	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	26.782.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSPER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		33.917.400,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.332.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSPER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		3.075.600,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	19.540.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSPER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		21.494.000,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasiona l	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.865.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		11.951.500,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	108.291.500,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		142.440.760,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 6	001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	10.800.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		19.033.960,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 6	001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasiona l	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	29.143.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		32.058.180,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	-			3 Jenis	180.835.900,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo	-	193.042.520,00	
	6	0 1	0 1	2.0 7	000 5	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	4.638.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		5.101.800,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasiona 1	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	159.642.900,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		175.607.190,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 7	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	16.555.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		12.333.530,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Laporan	159.667.362,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo	-	163.529.080,00	
	6	0 1	0 1	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

1



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasiona l	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	650.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		715.000,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	111.005.362,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		110.000.000,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	48.012.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		52.814.080,00	INSPEKTORA T DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasiona l	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	-			5 Jenis	258.005.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo	-	266.737.900,00	
	6	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		43.945.000,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	97.520.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		94.116.000,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit				48.400.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		53.242.200,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0	0	1	000 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	49.955.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo	55.000.000,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0	0	1	001 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19 Unit	18.170.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo	20.434.700,00	INSPEKTORA T DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasiona l	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	6	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-			100 %	1.524.506.900,00						-	1.676.957.880,00	
	6	0 1	0 2	2.0 1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-			7 Dokumen	1.214.092.500,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo	-	1.335.502.025,00	
	6	0 1	0 2	2.0 1	000 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				74 Laporan	146.334.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		160.967.400,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 2	2.0 1	000 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				96 Laporan	109.746.700,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		120.721.645,00	INSPEKTORA T DAERAH

1



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan					
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja														
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	17.711.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFERR UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		19.482.540,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan														
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				30 Laporan	100.300.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFERR UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyarakat Kab Purworejo		110.330.440,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasiona l	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				98 Laporan	250.000.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		275.000.000,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 2	2.0 1	000 6	Kerja Sama Pengawasan Internal														
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	30.000.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		33.000.000,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 2	2.0 1	000 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				6 Dokumen	560.000.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		616.000.000,00	INSPEKTORA T DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasiona l	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	0 1	0 2	2.0 2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-			2 Laporan	310.414.400,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo	-	341.455.855,00	
	6	0 1	0 2	2.0 2	000 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				10 Laporan	70.000.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		77.000.000,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 2	2.0 2	000 2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				121 Laporan	240.414.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		264.455.855,00	INSPEKTORA T DAERAH



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasiona l	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3	6	0	0			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	-			100 %	1.342.313.500,00						-	1.489.759.150,00				
	6	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-			2 Dokumen	63.460.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo	-	74.770.300,00				
	6	0	0	2.0	000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																	
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendas i	56.436.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		62.344.040,00	INSPEKTORA T DAERAH			
	6	0	0	2.0	000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasiona l	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendas i	7.023.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		12.426.260,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 3	2.0 2		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistens	-			4 Laporan	1.278.853.500,00			-	-	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo	-	1.414.988.850,00	
	6	0 1	0 3	2.0 2	000 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				6 perangkat daerah	15.302.100,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		16.832.310,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0 1	0 3	2.0 2	000 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				190 perangkat daerah	292.500.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		330.000.000,00	INSPEKTORA T DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasiona l	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	0	0	2.0	000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	821.051.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		903.156.540,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6	0	0	2.0	000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				156 perangkat daerah	150.000.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 5. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, prima, dan transparan	Aparatur, Masyaraka t Kab Purworejo		165.000.000,00	INSPEKTORA T DAERAH
	J U M L A H											15.001.051.401, 00							16.014.818.923, 00	



## **BAB. IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 disusun untuk mendukung penyelenggaraan pembinaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 akan menyelenggarakan Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang didukung 3 Program terdiri dari 12 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan.

Alokasi pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten tahun 2025 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka :

- a. Pengawasan intern (*assurance dan consulting service*) meliputi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, reuiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, reuiu laporan keuangan, dan kegiatan pengawasan lainnya
- b. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
- c. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.

- d. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan pendukung operasional pengawasan seperti pengadaan sarpras dan pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1  
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

N O	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM /HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
	<b>UNSUR PENGAWA SAN</b>					
	<b>URUSAN PEMERIN TAHAN</b>					
	<b>Bidang Urusan Inspektor at Daerah</b>				<b>15.001.051.401</b>	
<b>I</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>12.134.231.001</b>	
<b>i</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>29.106.200</b>	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	23.378.100	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	855.600	
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.872.500	
<b>ii</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>9.831.785.739</b>	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	9.826.667.739	
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.366.100	
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.227.900	



N O	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM /HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	26 Laporan	524.000	
iii		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.493.600</b>	
1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.427.400	
2		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.066.200	
iv		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.381.701.300</b>	
1		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	82.962.200	
2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	1.273.658.300	
3		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	65 Orang	9.696.600	
4		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	65 Orang	15.384.200	
v		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>289.635.900</b>	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.903.000	
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.138.800	
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.204.900	
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.633.500	
5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26.782.800	
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	2 Dokumen	1.332.000	



N O	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM /HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
		Perundang-undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan			
7		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	19.540.000	
8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.865.000	
9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	108.291.500	
10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	10.800.600	
11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	29.143.800	
vi		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>180.835.900</b>	
1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	4.638.000	
2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	159.642.900	
3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	16.555.000	
vi i		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>159.667.362</b>	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	650.000	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111.005.362	
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	48.012.000	
vi ii		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jenis Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara pada tahun tertentu</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>258.005.000</b>	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.960.000	

N O	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM /HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	97.520.000	
4		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	48.400.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.955.000	
5		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	18.170.000	
II		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>100%</b>	<b>1.524.506.900</b>	
			<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>100%</b>		
i		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>1.214.092.500</b>	
1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	74 Laporan	146.334.000	
2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	96 Laporan	109.746.700	
3		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	17.711.400	
4		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	100.300.400	
5		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	98 Laporan	250.000.000	
6		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	30.000.000	
7		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	560.000.000	
ii		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>310.414.400</b>	
1		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	70.000.000	



N O	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM /HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
2		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	121 Laporan	240.414.400	
<b>II</b>		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan</b>	100%	<b>1.342.313.500</b>	
			<b>Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi</b>	100%		
<b>i</b>		<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	2 Dokumen	<b>63.460.000</b>	
1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	56.436.400	
2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	7.023.600	
<b>ii</b>		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi</b>	4 Laporan	<b>1.278.853.500</b>	
1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 perangkat daerah	15.302.100	
2		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	190 perangkat daerah	292.500.000	
3		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	821.051.400	
4		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	165 perangkat daerah	150.000.000	

Rumusan rencana sasaran program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.2 sebagaimana berikut.



Tabel 4.2

SASARAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
20	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan
25	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara pada tahun tertentu
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan
i	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tersusunnya laporan, kesepakatan, dokumen hasil penyelenggaraan pengawasan internal
36	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
37	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
38	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja
39	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan
40	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa
41	Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal
42	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
ii	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tersusunnya Laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
43	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
44	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
i	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya rekomendasi hasil penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
45	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
46	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
ii	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi dan jumlah perangkat daerah yang



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN
		dilakukan pendampingan dan asistensi
47	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
48	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
49	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
50	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1.Catatan Penting**

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan Inspektorat pada tahun 2025 yang mempedomani perencanaan jangka menengah perangkat daerah (Renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026) dan perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Purworejo (RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025).

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2025, memuat nama kegiatan, waktu, lokasi, biaya serta gambaran yang jelas tentang hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran sesuai prioritas program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2025 telah mengakomodir *mandatory spending* untuk pengawasan dan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah.

#### **5.2.Kaidah Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Purworejo memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023
2. Memperhatikan isu-isu penting dalam penyelenggaraan fungsi perangkat daerah.
3. Memperhatikan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
4. Mempedomani rencana program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Inspektorat untuk penyusunan perencanaan tahap selanjutnya.
5. Memperhatikan prioritas sasaran dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam penganggaran pelaksanaan kegiatan.

#### **5.3.Rencana Tindak lanjut**

Rencana tindak lanjut yang akan diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah :

1. Melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat secara efektif, efisien dan ekonomis;
2. Melaksanakan program kegiatan yang direncanakan untuk membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam renja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan renja yang telah dibuat.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2025 untuk dijadikan pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan Inspektorat pada tahun 2025 guna mencapai target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

